



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) TAHUN 2024



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2025**

KATA PENGATAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban serta akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan serta penggunaan anggaran, juga sebagai media informasi kepada publik atas capaian kinerja organisasi berdasarkan perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang memberikan informasi kinerja secara akurat dan obyektif pada stakeholder untuk menciptakan kinerja yang lebih baik, demikian laporan kinerja ini disusun, semoga dapat bermanfaat.

Benteng, Januari 2024

KEPALA BAPPELITBANGDA 



Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19840104 200903 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB.I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Maksud dan tujuan.....	1
I.3. Gambaran Umum Organisasi	1
1.3.1. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3.2. Struktur Organisasi	2
1.3.3. Cascading Kinerja	3
1.3.4. Dukungan SDM, sarana prasarana dan anggaran.....	4
I.4. Isu – Isu Strategis.....	7
I.5. Tindak lanjut atas LHE Sakip Tahun 2023	8
BAB.II. PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.1.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026	12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda..	13
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
2.2. Indikator Kinerja Utama	15
2.3. Rencana Kerja Tahunan	16
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
BAB.III. Akuntabilitas Kinerja.....	24
3.1. Pengukuran Kinerja	24
3.2. Analisis Capaian Kinerja	26
3.2.1. Pengukuran Capaian Tujuan ke-1	26
3.2.1.A Pengukuran Capaian Sasaran ke-1	28
3.2.1.B Pengukuran Capaian Sasaran ke-2	47

3.2.1. Pengukuran Capaian Tujuan ke-2 51

3.2.2.A Pengukuran Capaian Sasaran ke-3 52

3.3. Realisasi Keuangan 57

BAB.IV. PENUTUP 74

Lampiran 76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah pegawai ASN berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2024.....4

Tabel 1.2. Jumlah pegawai ASN berdasarkan Golongan Ruang Tahun 20245

Tabel 1.3. Jumlah pegawai ASN yang menduduki jabatan Tahun 20246

Tabel 1.4. Jumlah Aset Bappelitbangda Kep. Selayar per Desember 2024.....6

Tabel 1.5. Perbandingan dukungan anggaran tahun 2021 dan tahun 2024.....7

Tabel 1.6. Rumusan Masalah dan Isu Strategis.....8

Tabel 2.1. Ringkasan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi RPJMD Kab. Kep Selayar Tahun 2021-2026 11

Tabel 2.2. Matriks Tujuan dan Sasaran Strategis 13

Tabel 2.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2021-2026..... 14

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2021 – 2026 16

Tabel 2.5. Croscutting Sasaran Program dan Anggaran Rencana Kerja tahun 2024 16

Tabel 2.6. Rencana Kerja Bappelitbangda Kep Selayar Tahun 2024 17

Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun Anggaran 202423

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja24

Tabel 3.2. Capaian IKU Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.....25

Tabel 3.3. Capain Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.....25

Tabel 3.4. Target dan realisasi kinerja tujuan ke-126

Tabel 3.5. Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 202427

Tabel 3.6. Target dan realisasi kinerja sasaran ke-128

Tabel 3.7. Croscutting Sasaran Program Kegiatan.....29

Tabel 3.8. Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah
dengan program prioritas daerah tahun 202333

Tabel 3.9. Croscutting Sasaran Program Kegiatan.....45

Tabel 3.10. Capaian Anggaran Sasaran ke-1 sampai triwulan 1 45

Tabel 3.11. Tingkat Efisiensi Sasaran Ke-145

Tabel 3.12. Target dan realisasi kinerja sasaran ke-2.....47

Tabel 3.13. Croscutting Sasaran Program Kegiatan.....48

Tabel 3.14. Croscutting Sasaran Program Kegiatan.....50

Tabel 3.15. Capaian Anggaran Sasaran ke-250

Tabel 3.16. Tingkat Efisiensi Sasaran ke-2.....50

Tabel 3.17. Target dan realisasi kinerja tujuan ke-2.....51

Tabel 3.18. Target dan realisasi kinerja sasaran ke-3.....51

Tabel 3.19. Croscutting Sasaran Program Kegiatan.....55

Tabel 3.20. Capaian Anggaran Sasaran ke-355

Tabel 3.21. Tingkat Efisiensi Sasaran ke-3.....56

Tabel 3.22. Target belanja Bappelitbangda APBD Perubahan
Tahun Anggaran 202457

Tabel 3.23. Formulir Evaluasi Hasil Renja, Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Tahun Pelaksanaan 2024 ...58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappelitbangda
Kepulauan Selayar..... 3

Gambar 1.2. Pohon Kinerja Bappelitbangda Kepulauan
Selayar 2023..... 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan pembangunan.

Dalam laporan kinerja ini terkandung instrument yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dengan maksud mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan yang dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, disebutkan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappelitbangda mempunyai fungsi:
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- f. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Struktur Organisasi

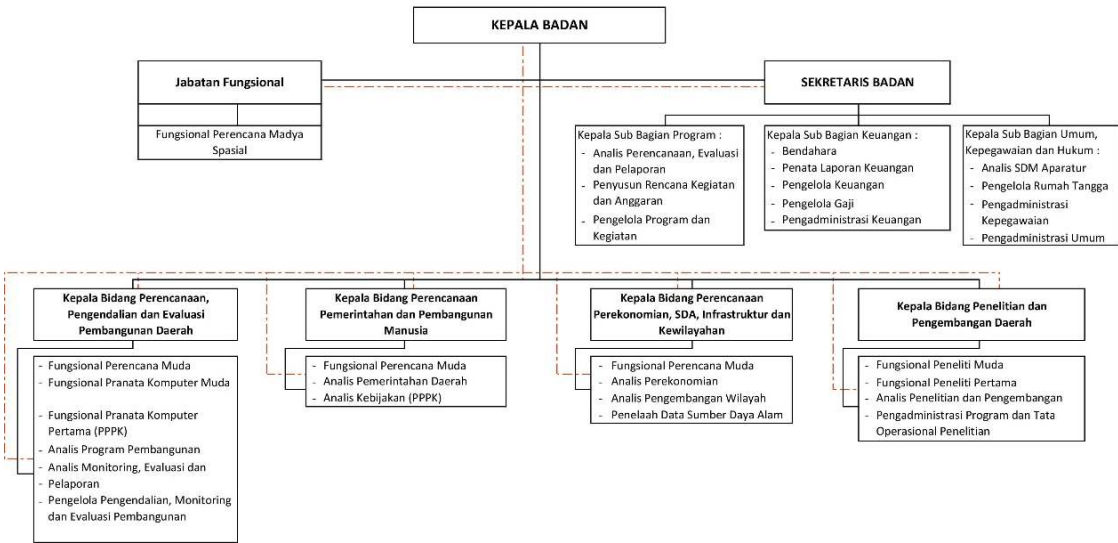
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- 3) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
- 4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 5) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Perencana Ahli; dan
 - b. Peneliti Ahli.

Struktur organisasi Bappelitbangda digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

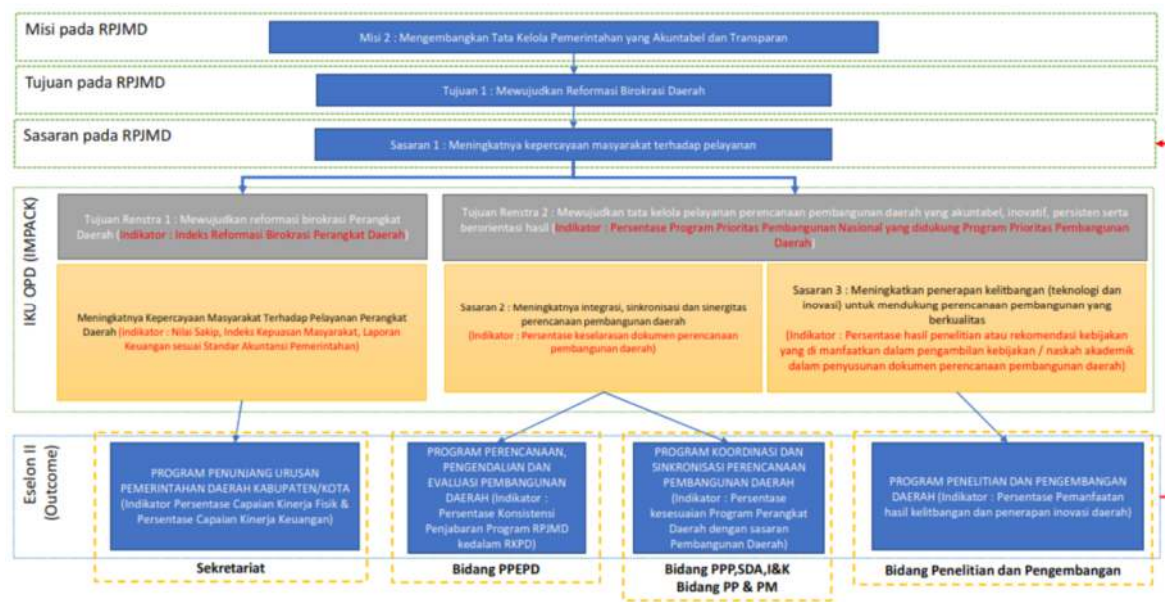
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kep Selayar



1.3.3. Cascading Kinerja

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk agar dapat memberikan dukungan penuh dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Adapun cascading kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2
Perubahan Cascading Kinerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2026



1.3.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana Dan Anggaran

Berdasarkan data kepegawaian Bappelitbangda Kepulauan Selayar per Desember 2024 terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 30 orang dan pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 33 orang, Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar adalah sebanyak 63 pegawai.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel. I.1.
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	Perguruan Tinggi	27	87,10%	44,26%	23	76,67%	37,70%
1	S3	2	6,45%	3,28%			
2	S2	12	38,71%	19,67%			
3	S1	13	41,94%	21,31%	22	73,33%	36,07%
4	D3	0	0,00%	0,00%	1		

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	Bukan Perguruan Tinggi	4	12,90%	6,56%	7	23,33%	11,48%
1	SMA	4	12,90%	6,56%	7	23,33%	11,48%
Jumlah		30			31		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN)		61					

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2024

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 30 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 7 pegawai (23%), golongan III sebanyak 20 pegawai (67%), dan golongan II sebanyak 3 pegawai (10%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel. I.2.
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2024

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	10	32%
	IV/c	1	3%
	IV/a	9	29%
2.	Golongan III	19	61%
	III / d	8	26%
	III / c	4	13%
	III / b	4	13%
	III / a	3	10%
3.	Golongan II	2	6%
	II / d	0	0%
	II / c	2	6%
	II / b	0	0%
Jumlah		31	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2024

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 30 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3.33%) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (16,67%) yang menduduki eselon III, 3 pegawai (10%) yang menduduki eselon IV, 11 pegawai (36.67%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 10 pegawai (33.33%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel. I.3.

Jumlah, Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	3,23%
2	Eselon III	5	16,13%
3	Eselon IV	3	9,68%
4	Jabatan Fungsional Tertentu	11	35,48%
5	Jabatan Fungsional Umum	11	35,48%
Jumlah		30	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2024

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda dapat berjalan dengan baik, perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar secara berkesinambungan, daya dukung sarana penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan perkantoran yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel. 1.4.

Jumlah Aset Bappelitbangda Kep. Selayar
per Desember 2024

KODE ASET	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
	1	2	3
03	ASET TETAP		
01	Tanah		-
	01 Tanah		
02	Peralatan Dan Mesin	344	3.164.122.955,00
	01 Alat Besar		
	02 Alat Angkutan	36	1.123.639.100,00
	03 Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2	16.651.550,00
	04 Alat Pertanian		-
	05 Alat Kantor Dan Rumah Tangga	173	836.155.995,00
	06 Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	13	170.523.200,00
	07 Alat Kedokteran Dan Kesehatan		-
	08 Alat Laboratorium	5	3.680.000,00
	09 Alat Persenjataan		
	10 Komputer	114	989.473.110,00
	11 Alat Eksplorasi		
	12 Alat Pengeboran		
	13 Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian		20.000.000,00
	14 Alat Bantu Eksplorasi		
	15 Alat Keselamatan Kerja	1	4.000.000,00
	16 Alat Peraga		

KODE ASET	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
	1	2	3
17	Peralatan Proses/Produksi		
18	Rambu - Rambu		
19	Peralatan Olah Raga		
03	Gedung Dan Bangunan	4	2.728.745.053,00
01	Bangunan Gedung	4	2.728.745.053,00
02	Monumen		
03	Bangunan Menara		
04	Tugu Titik Kontrol/Pasti		
04	Jalan, Jaringan Dan Irigasi		-
01	Jalan Dan Jembatan		
02	Bangunan Air		
03	Instalasi		
04	Jaringan		
05	Aset Tetap Lainnya	1	144.405.800,00
01	Bahan Perpustakaan	1	144.405.800,00
02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
03	Hewan		
04	Biota Perairan		
05	Tanaman		
06	Barang Koleksi Non Budaya		
07	Aset Tetap Dalam Renovasi		
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-
01	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
05	Aset Lainnya	105	165.643.687,00
02	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		-
01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
03	Aset Tidak Berwujud		56.800.000,00
01	Aset Tidak Berwujud	2	56.800.000,00
04	Aset Lain-Lain		618.808.750,00
01	Aset Lain-Lain	103	618.808.750,00
05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(48.747.666,67)
01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(48.747.666,67)
06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(461.217.395,84)
01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(461.217.395,84)

Sumber : Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar 2024

Tabel. 1.5.
Perbandingan Dukungan Anggaran
Tahun 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024

Tahun	Jumlah
2021	Rp. 7.112.120.900
2022	Rp. 5.133.941.600
2023	Rp. 6.322.618.083
2024	Rp. 6.268.178.000

Sumber : Bappelitbangda 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp. 6.268.178.000, turun 0,87% dari tahun sebelumnya.

1.4. ISU – ISU STRATEGIS

Dalam penjabaran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, salah satu substansi dalam perencanaan adalah dengan perumusan masalah atau identifikasi masalah dilakukan terlebih dahulu yang kemudian ditindak lanjuti dengan perumusan isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, maka diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.6
Rumusan Masalah dan Isu Strategis

Rumusan masalah	Isu Strategis
1) Keterbatasan data dan informasi, Data yang tidak valid, tidak mutakhir, atau tidak lengkap; 2) Inovasi teknologi, pemanfaatan teknologi modern, seperti aplikasi perencanaan berbasis GIS atau big data analisis; 3) Dinamika sosial dan politik, perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan	1) Pembangunan dan pengembangan platform berbasis teknologi informasi (GIS dan Big Data Analisis), dibutuhkan kolaborasi dengan perangkat daerah pengampu urusan/kewenangan; 2) Peningkatan kolaborasi antar stekholder baik dari akademisi dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan Pembangunan

1.5. TINDAK LANJUT ATAS LHE SAKIP TAHUN 2023

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
A) Perencanaan Kinerja		
1.	Dokumen Perencanaan kinerja belum sepenuhnya tersedia dengan kondisi sebagai berikut: - Belum terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.	Telah Menyusun Pedoman Teknis Perencanaan kinerja dan Standar operasional prosedur pengumpulan data kinerja.

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
	- Telah terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja (Rencana Aksi) namun tidak memuat penjelasan rangkaian aktivitas untuk masing-masing sub kegiatan. Rekomendasi : Melengkapi dokumen Perencanaan Kinerja dalam rangka memenuhi standar yang menggambarkan keberadaan dokumen atas perencanaan kinerja.	
2.	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin di capai, namun dokumen Perencanaan Kinerja belum mempertimbangkan factor kritis atau critical success factor (CFS) dari setiap pencapaian kinerja, dan belum menggambarkan pemecahan masalah atau solusi dari kondisi yang dihadapi. Rekomendasi : Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja dengan memperhatikan factor kritis atau Critical Success Faktor (CFS) dan memperhatikan unsur logis atau kinerja yang ingin dicapai.	Telah menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja dengan memperhatikan factor critical success (CFS) sesuai dengan kaidah dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021.
B) Pengukuran Kinerja		
a	Belum terdapat SOP yang mengakomodir perubahan jika terjadi kesalahan dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja. Rekomendasi : menyempurnakan mekanisme pengumpulan data kinerja agar memenuhi standar yang menggambarkan keberadaan dokumen atas pengukuran kinerja	SOP Pengumpulan dan Pelaporan Kinerja telah disusun dan di sahkan oleh Kepala Bappelitbangda.
b	1. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. 2. Pengukuran Kinerja belum mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. Rekomendasi : menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian Reward and Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	Dasar pemberian Reward and Punishment telah disusun, dan penilaian kinerja telah dibuat.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar

Perumusan rencana strategis dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi misi yang telah ditetapkan dapat terwujud, Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (pilkada), kemudian disusunlah tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bentuk pernyataan-pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, Adapun tujuan, sasaran dan strategi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026
Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1. Meningkatnya efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, penguatan system kelembagaan dan pengawasan, dan meningkatnya inovasi serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
Misi 2 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Perdesaan		
2. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan.	2. Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat perdesaan dan kualifikasi desa.
	3. Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas perekonomian perdesaan.	3. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya local dalam rangka mengembangkan lapangan kerja dan lapangan usaha di perdesaan.
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		
3. Meningkatkan Fasilitas pembangunan sumber daya Manusia	4. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar masyarakat	4. Meningkatkan akses dan pemerataan layanan Pendidikan dan Kesehatan
	5. Meningkatnya daya beli masyarakat	5. Meningkatkan pendapatan masyarakat
Misi 4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman		
4. Mengoptimalkan fasilitas pembangunan sumber daya manusia	6. Meningkatnya usaha perikanan	6. Memperkuat dukungan sarana dan prasarana perikanan, penciptaan nilai tambah melalui pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	7. Meningkatnya Usaha Pariwisata	7. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana kepariwisataan, daya Tarik destinasi, ekonomi kreatif, promosi, dan sumberdaya manusia pariwisata
	8. Meningkatnya usaha industry, transportasi dan perdagangan	8. Memperkuat dukungan sarana dan prasarana pengembangan industry, peningkatan akses transportasi dan infrastruktur Pelabuhan, dan akselerasi perdagangan dalam dan luar wilayah melalui Kerjasama antar daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 5 : Meningkatnya Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan		
5. Meningkatnya aktualisasi nilai budaya	9. Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan local dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	9. Meningkatkan peran Lembaga sosial dan keagamaan dalam pembangunan manusia dan daerah
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	10. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	
Misi 6 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup		
7. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	11. Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026.

Melihat dari tabel 2.1 diatas, Bappelitbangda mendukung pada pencapaian misi 1, tujuan 1, sasaran 1, Adapun sasarannya yaitu : Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Bappelitbangda 2021-2026

Dari hasil telaahan, maka pokok-pokok perwujudan tujuan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut :

Tabel 2.2
Matriks Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda 2021 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	B	B	BB	BB	BB
			Indeks Kepuasan Masyarakat	C	B	B	B	B
			Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, persisten serta berorientasi hasil		Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	80%	85%	90%	95%	95%
		Meningkatkan penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Perubahan Renstra Bappelitbangda Kep. Selayar 2021-2026

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode 5 tahun, maka disusunlah strategi dan kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar kurun waktu 2021-2026, adapun strategi dan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia			
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah (T1)	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (S1)	1. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik; 2. Meningkatkan Inovasi Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	1. Meningkatkan Kapabilitas kelembagaan Perencana, koordinasi dan kompetensi SDM Perencana; 2. Meningkatkan akuntabilitas manajemen kinerja melalui keterbukaan informasi pelayanan publik; 3. Menerapkan pengelolaan sistem keuangan yang berbasis akrual sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan;
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, persisten serta berorientasi hasil (T2)	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah (S2) Meningkatkan penerapan kelitbang (teknologi dan inovasi) untuk mendukung	4. Pengoptimalan Koordinasi Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah melalui sistem informasi terintegrasi; 5. Pengoptimalan Koordinasi Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;	4. Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang Didukung Pengendalian dan Evaluasi serta Penyediaan Data Informasi Kebutuhan Perencanaan; 5. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan serta Pengoptimalan

	perencanaan pembangunan yang berkualitas (S3).	6. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.	Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Lingkup (a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, (b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan (c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan”; 6. Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian yang aplikatif sebagai materi naskah akademik atau dalam bentuk pengambilan kebijakan (Policy Brief) bagi Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta, Infrastruktur dan Kewilayahan”.
--	--	---	---

Sumber : Perubahan Renstra Bappelitbangda Kep. Selayar 2021-2026

2.2. Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen penetapan kinerja antara atasan dan bawahan, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran, disusun dan ditetapkan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya dan tugas pokok serta fungsi yang dimiliki oleh individu atau organisasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 08/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026, di uraikan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan			
A	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, persisten serta berorientasi hasil		Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah program prioritas pembangunan nasional yang didukung oleh program prioritas daerah}}{\text{Jumlah program prioritas pembangunan nasional}} \times 100$			
1.				Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah program RKPd yang selaras dengan RPJMD}}{\text{jumlah program dalam RPJMD}} \times 100$	
		2.	Meningkatnya penerapan teknologi dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas			Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik	$\frac{\text{Jumlah hasil penelitian atau kajian yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah penelitian atau kajian yang dihasilkan}} \times 100$

Sumber : Dokumen Perubahan IKU Bappelitbangda Kep. Selayar

2.3. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahun 2024, Bappelitbangda Kepulauan Selayar melaksanakan 4 Program, 18 kegiatan dan 68 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Crosscutting Sasaran Program dan Anggaran
DPA Perubahan tahun 2024

N o	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase Anggaran	Ket
1	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 969.898.700	15,47	Bappelit bangda
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 560.528.400	8,94%	Bappelit bangda
2	Meningkatkan penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 350.000.000	5,58%	Bappelit bangda
3	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /	Rp.4.387.750.900	70,00%	Bappelit bangda

Sumber : DPA Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2024

Tabel 2.6
Rencana Kerja Bappelitbangda Kep. Selayar Tahun 2024

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2023
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja		4.387.750.900
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan		
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	15.000.000
5.01.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.000.000
5.01.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000
5.01.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000
5.01.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000
5.01.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000
5.01.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4.000.000
5.01.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.000.000
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	100%	3.276.102.600
5.01.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.256.102.600
5.01.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	12.000.000
5.01.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.000.000
5.01.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.000.000
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	100%	7.559.900

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2023
5.01.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.469.400
5.01.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.090.500
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang di tingkatkan Kualitas dan Kapabilitasnya	100%	10.000.000
5.01.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	10.000.000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah yang di selenggarakan	100%	559.749.500
5.01.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.437.500
5.01.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12.120.000
5.01.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	472.592.000
5.01.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	54.600.000
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	59.775.200
5.01.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	55.113.900
5.01.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.661.300
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	270.493.700
5.01.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	27.872.000
5.01.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	242.621.700
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	189.070.000
5.01.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	140.500.000
5.01.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2.480.000
5.01.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	6.410.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2023
5.01.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	8.000.000
5.01.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.920.000
5.01.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	9.760.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	90%	969.898.700
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	90%	694.444.500
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	41.316.000
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	90.849.800
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	13.996.700
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	65.455.000
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	440 Usulan	48.480.000
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	434.347.000
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100%	44.014.000
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	15.560.500
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	28 Orang	10.822.500
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	17.631.000
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan	100%	231.440.200
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	19.897.200
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	211.543.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah (%)	90%	560.528.400

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2023
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90%	343.692.000
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	15.285.600
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	10.244.700
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	15.686.400
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	37.212.800
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	33.412.200
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	8.501.400
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	134.754.500
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	88.594.400
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	90%	65.435.400
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	14.134.100
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	6.279.700

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2023
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	3.350.000
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	28.614.300
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	5.348.300
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	7.709.000
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90%	151.401.000
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	50.027.300
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	3.886.400
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	58.596.900
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	10.784.900
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	19.373.400
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11 Laporan	3.457.100
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	3.529.300

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU PERUBAHAN T.A. 2023
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1.745.700
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	100%	350.000.000
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di manfaatkan	100%	241.010.000
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	73.010.000
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	168.000.000
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan	100%	57.993.000
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	57.993.000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan	50%	50.997.000
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	50.997.000

Sumber : DPA Perubahan Bappelitbangda Tahun Anggaran 2024

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kep Selayar Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, persisten serta berorientasi hasil	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	90%
		Meningkatkan penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%
3	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	BB
			Indeks Kepuasan Masyarakat	B
			Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Bappelitbangda Kep Selayar

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan tanggung jawab suatu organisasi atau individu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan atas penggunaan anggaran, sesuai dengan perencanaan yang dibuat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau Masyarakat.

Bappelitbangda Kepulauan Selayar melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang telah diperjanjikan Kepala Bappelitbangda dengan Bupati Kepulauan Selayar tahun 2024. Dengan perhitungan capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian

Rencana Tingkat Capaian

=

Realisasi

Target Rencana

X 100%

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau Muda
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning Tua
4	51% ≤ 65%	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

Implementasi dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kepulaaun Selayar Nomor : 08/I/Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian IKU Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2024

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Satu an	Tar get	Realisa si	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	90	100	111,11
2.	Meningkatkan penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kep Selayar Tahun 2024

Adapun tujuan, sasaran, indikator dan capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2024

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tar get	Realisa si	Capaian Kinerja	Ko de
A.	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, persisten serta berorientasi hasil		Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah	%	100	100	100	
1.		Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	90	100	111,11	
2.		Meningkatkan penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	
B.	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	na	na	na	na	
3.			Nilai Sakip	nilai	BB	BB* (70,10)	100	
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	B	B	100	
			Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	nilai	Ses uai	na	na	

Sumber : Bappelitbangda Kep Selayar Tahun 2024

* Capaian Tahun 2023

Bappelitbangda Kepulauan Selayar memiliki 2 (dua) indikator tujuan dan 5 (lima) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis. Pada tahun 2024, persentase capaian sebesar 101.11% dengan 1 Indikator sasaran hasil pengukuran tahun sebelumnya.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran dijabarkan sesuai dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pencapaian realisasi masing-masing indikator. Berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta Indikator-Indikator Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 :

3.2.1 Pengukuran Capaian Tujuan ke -1

Tujuan ke-1 ini menjadi indikator impack yang berfokus pada sinergi antara pusat dan daerah guna mendukung dan berkontribusi langsung pada pencapaian target Pembangunan nasional, baik dalam hal pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas Pendidikan atau Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Indikator ini di topang oleh 2 (dua) Indikator Sasaran.

Tujuan	: Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, inovatif, konsisten serta berorientasi hasil
Indikator	: Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah

Target dan Realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Target dan Realisasi kinerja tujuan ke-1

N o	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2023)	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026
			Tar get	Real isasi	Capai an		
1.	Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100

Sumber Bappelitbangda Kep Selayar 2024

➤ **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator Tujuan ke-1**

Indikator Persentase Program Prioritas Pembangunan Nasional yang didukung oleh Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan alat ukur yang digunakan untuk melihat sejauh mana program-program prioritas yang ditetapkan di tingkat nasional

mendapat dukungan dan implementasi di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota), dihitung dengan membandingkan jumlah program nasional yang diadopsi oleh daerah dengan jumlah total program prioritas nasional. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan bersama. Indikator ini penting untuk memastikan adanya sinergi antara kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

keterkaitan antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 3.5
Matriks Program Prioritas Daerah yang mendukung
Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar	Jumlah Program	Ket
1	1. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif	15 Program	
2	2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2) Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/sub sentra	8 Program	
3	3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar			
4	4. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	3) Peningkatan investasi sektor unggulan daerah	14 Program	
		4) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam bernilai ekonomi berbasis potensi desa	9 Program	
5	5. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	5) Peningkatan derajat hidup masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat	19 Program	
6	6. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing			
7	7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	7 Program	
J U M L A H			72 Program	

Sumber : RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024

Pernyataan pada tabel 3.5 diatas dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 halaman 117 dan tabel 3.8 di bawah (pengukuran capaian sasaran ke – 2).

3.2.1.A. Pengukuran Capaian Sasaran ke - 1

Sasaran ke-1 ini berfokus pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan indikator sebagai berikut :

Sasaran	: Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
Indikator	: Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi kinerja sasaran ke-1

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2023)	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	90	100	111,11	95	105.26

Sumber Bappelitbangda Kep Selayar 2024

- **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator sasaran ke-1**
- Indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan dokumen turunannya, saling terintegrasi serta selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi, tujuannya agar 1) efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan dalam pencapaian target pembangunan meningkat, 2) tumpang tindih kebijakan atau program antar perangkat daerah dapat dihindari, sehingga pembangunan lebih terarah dan tepat sasaran. 3) perencanaan yang berbasis data dan bukti untuk menghasilkan kebijakan yang

relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta berjalan lebih efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja sasaran (intermediate outcome) satu didukung dengan 2 (dua) Program (indikator outcome), yakni 1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan 2) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 3.7
Croscutting Sasaran Program

Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Program	Indikator	target	Capaian
Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	90	100	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	90	100
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	90	100

Penjelasan Capaian Indikator Program (Outcome)

➤ **Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah** dengan indikator kinerja Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, Indikator ini menunjukkan seberapa baik program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program RPJMD yang tercantum dalam RKPD dan jumlah program RPJMD yang seharusnya ada dalam RKPD. Persentase konsistensi penjabaran program dalam RKPD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah menerjemahkan RPJMD dengan baik dan konsisten.

1. Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, terdapat 285 (dua ratus delapan puluh lima) program perencanaan Pembangunan

yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 terdapat 236 (dua ratus tiga puluh enam) program pernyataan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 halaman 54

2. Kesesuaian program RKPD dan APBD.

Dari 236 program yang terdapat pada RKPD Tahun 2024, terdapat 206 program yang dianggarkan pada APBD dan sebanyak 30 program atau sebanyak 10,58 persen yang tidak dianggarkan pada APBD;

3. Kesesuaian program RPJMD dan APBD.

Dari 285 program dalam RPJMD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, hanya 206 program yang di anggarkan pada APBD Tahun 2024, terdapat 79 program yang tidak dianggarkan pada APBD.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, didukung dengan kegiatan 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Beberapa upaya dalam rangka menunjang dan memonitoring pencapaian indikator kinerja program ini, diantaranya adalah :

1. Penyusunan dan Penetapan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2029;
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik Dokumen RKPD Tahun 2024;
3. Fasilitasi Pelaksanaan Musrembang Kecamatan dan Pelaksanaan Musrembang RKPD Tahun 2024;
4. Verifikasi Usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2024;
5. Rapat Komisi di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD Tahun 2024) pada Bappelitbangda Propinsi Sulawesi-Selatan;
7. Penyusunan dan Penetapan Dokumen RKPD Tahun 2025;

8. Penyusunan dan Penetapan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2024;
9. Pendampingan pelaksanaan e-planning (proses perencanaan dan penganggaran dan pelaporan) melalui aplikasi terpusat yang disediakan kemendagri yakni SIPD;
10. Penyusunan Buku Profil Pembangunan Tahun 2023;
11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala pengendalian pembangunan berbasis web (e-manca)

Selain upaya pencapaian kinerja tersebut diatas, tahun 2024 Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan penyusunan Rancangan Awal (Tekhnokratik) RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

➤ **Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan indikator kinerja Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah, indikator ini mengukur sejauh mana program prioritas yang diterapkan oleh perangkat daerah sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah program prioritas perangkat daerah yang sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah dengan jumlah total program prioritas perangkat daerah. Semakin tinggi persentase kesesuaian, maka semakin baik program prioritas perangkat daerah mewujudkan sasaran prioritas pembangunan daerah. Ini penting untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Indikator ini juga membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengevaluasi kinerja program prioritas perangkat daerah dan memastikan bahwa program pembangunan daerah selaras dengan sasaran prioritas pembangunan daerah.

Perumusan program prioritas tahun 2024 mengacu pada tema pembangunan RKP Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 diarahkan untuk: (a).pertumbuhan ekonomi, (b).tingkat pengangguran terbuka, (c).rasio gini, (d).Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (e).penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Selain itu,

aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan

Sehubungan dengan hal tersebut maka rencana prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, penjelasan keterkaitan antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah seperti tertuang pada dokumen RKPD tahun 2024 halaman 287 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Keterkaitan Sasaran Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2024

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Peningkatan derajat hidup masyarakat yang berkarakter, berbudaya dan bermartabat								
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Persen	65,5	100	57.041.804.200	Disdikpora
				Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	78,74	100		
				Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Persen	88,46	100		
		2	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	Persen	47,55	100	260.000.000	Dinsos
		3	Program rehabilitasi sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	100	6.100.000.000	Dinsos
				Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	98,59	100		
				Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	98,99	100		
				Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100	100		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	47,55	100		
		4	Program penanganan bencana	Persen	100	100	620.000.000	Dinsos
		5	Program pengembangan perumahan	Persen	82,99	100	623.437.596	DPKP
			Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	0	100		
		6	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persen	48,33	49,36	565.943.000	Distan KP
		7	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Persen	72,54	80,0	2.638.033.200	DP3AP2KB
		8	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Angka	31/1000 Penduduk	36/100.000 Penduduk	50.000.000	Dinkes
		9	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (SPM)	Persen	76,3	100	111.534.676.194	Dinkes
			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	76,4	100		
			Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	80,04	100		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
				Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	54,8	100		
				Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	68,97	100		
				Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		
				Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	50,9	100		
				Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	85,56	100		
				Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Kategori	Utama	Utama		
2	Maningkatnya Daya Beli Masyarakat	1	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase jenis komoditi yang dipantau	Persen	20,58	100	421.200.350	Disdag KUKM

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
		2	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	Persen	18,23	100	10.000.000	Disdag KUKM
3	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	1	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang Dirumuskan	Persen	100	100	498.776.200	Kesbangpol
		2	Program pengembangan kebudayaan	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Persen	100	100	151.000.000	Disparbud
		3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	Persen	0	0	820.638.700	Semua Kecamatan
4	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	1	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	Persen	0,43	1	433.151.200	Semua Kecamatan
		2	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketanahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Dirumuskan	Persen	100	100	498.776.200	Kesbangpol
5	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program pembinaan perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	9,40	10,50	224.486.000	DPK
		2	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga (medali)	Medali	42,50	60,00	2.489.561.300	Disdikpora
		3	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	Persen	37,41	20,00	50.000.000	Dinkes
2	Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif								
1	Meningkatnya kepercayaan	1	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan sistem informasi terkait program kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persen	43,24	100	1.039.255.100	Diskominfo SP

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
	masyarakat terhdap pelayanan	2	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase urusan bidang pemerintahan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100	100	4.050.000.000	Setda
				Persentase urusan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	97	100		
		3	Program kepegawaian daerah	Persentase Pemenuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persen	23,35	92,60	1.185.907.300	BKPSDM
				Persentase ASN yang berkinerja baik	Persen	96,67	100		
		4	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Menit	25,71	15	396.089.750	Semua Kecamatan
		5	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	96,49	97,00	2.556.229.800	Bappelitbang da
		6	Program penyelenggaraan pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,002	3+	5.093.465.100	Inspektorat Daerah
		7	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	8,09	5,00	162.550.412.632	BPKPD
		8	Program pendaftaran penduduk	Persentase Penerbitan KTP-el	Persen	90,26	98,00	565.000.000	Disdukcapil
				Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	55,69	57,00		
		9	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (SPM)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	420.642.000	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Persen	100	100		
		10	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	0,543	0,560	89.860.200	DP3AP2KB

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
		11	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara terintegrasi	Persen	26,08	100	3.484.223.500	Diskominfo SP
		12	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah	Persen	100	100	1.353.586.600	Bappelitbang da
		13	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	903.000.000	Bappelitbang da
		14	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Trintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD	Persen	100	100	13.389.657.700	Setwan
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program administrasi pemerintahan desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi	Persen	100	100	753.757.400	DisPMD
3	Pembangunan infrastruktur pendukung program strategis dan prioritas pada sub kawasan/ sub sentra								
1	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program penyelenggaraan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Persen	58,24	73,19	41.608.473.302	DisPUTR
				Proporsi panjang jalan desa yang terbangun	Persen	0	85,00		
				Tingkat Kemantapan Jembatan Kabupaten	Persen	96,00	99,00		
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	2	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS Kewenangan Kabupaten	Persen	78,72	92,00	11.664.546.419	DisPUTR
				Persentase Luas Kawasan Permukiman sepanjang Pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Persen	0	45,00		
				Persentase Luas Daerah irigasi kewenagan Kabupaen Kota yang di layani oleh jaringan irigasi	Persen	1,78	1,92		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
		3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	58,23	100	12.681.410.025	DisPUTR
		4	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	0	100	9.302.966.518	DisPUTR
		5	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	0,50	3,42	2.691.172.291	DPKP
		6	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian	Persen	97,37	100	7.156.034.300	Distan KP
3	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	1	Program pengelolaan pelayaran	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	Persen	41,37	63,94	1.548.203.364	Dishub
		2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kabupaten	Persen	25,23	30,85	1.740.500.120	Dishub
4	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam bernilai ekonomi berbasis potensi desa								
1	Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekomian Perdesaan	1	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,48	2,00	661.000.000	Disperin TK
		2	Program penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Persen	39,06	39,69	200.000.000	Disperin TK
		3	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	Persen	54,62	100	613.187.100	Disdag KUKM
		4	Program penyuluhan pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	26,95	27,72	193.018.300	Distan KP

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
		5	Program kawasan permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	Persen	6,32	4,22	977.134.526	DPKP
		6	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK K R, dan UPPKS)				1.226.482.600	DP3AP2KB
				BKB	Persen	14,38	0,74		
				BKR	Persen	5,74	0,61		
				BKL	Persen	6,00	0,62		
				PIK R	Persen	4,30	0,51		
				UPPKS	Persen	5,09	0,91		
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	Persen	33,33	33,33	841.640.755	DisPMD
		2	Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	Persen	0	3,70	200.575.000	DisPMD
		3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	97,73	100	8.980.829.606	Semua Kecamatan
5	Peningkatan investasi sektor unggulan daerah								
1	Meningkatnya usaha perikanan	1	Program promosi penanaman modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	2,281	2,3	261.688.550	DPMPPTSP
		2	Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	21.223,40	25.480,87	2.625.740.350	Disper
		3	Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	528,66	1.139,25	1.349.192.772	Disper
		4	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi	Persen	100	100	1.591.693.800	Setda

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
		5	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Volume Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	241,48	261,49	984.382.312	Disper
		6	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase IKM yang terdaftar pada Sistem Informasi nasional	Persen	0,02	45,00	80.000.000	Disperin TK
2	Meningkatnya usaha pariwisata	1	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	5,16	6,00	1.865.000.000	Disparbud
		2	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	777,27	800,00	800.000.000	Disparbud
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara yang datang ke kabupaten Kepulauan Selayar	Persen	242,72	350,00		
				Tingkat huniaan akomodasi	Persen	3,97	10,00		
		3	Program pengelolaan penerbangan	Persentase rekomendasi izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang diterbitkan	Persen	0	100	5.125.150	Dishub
		4	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM/tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pelatihan	Persen	100	100	400.000.000	Disparbud
		5	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	Persen	100	100	55.019.100	Disdag KUKM
		6	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM yang berkembang modal usaha dan tenaga kerja	Persen	10,00	18,00	2.840.000.000	Disperin TK
3	Meningkatnya usaha industri,	1	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Juta Rupiah	12,826	67	335.173.400	DPMPTSP

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
	transportasi, dan perdagangan	2	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase permintaan data dan informasi yang diterima secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	19.679.200	DPMPTSP
6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana								
1	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	1	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Pencemaran Status Mutu Air	Angka	1,76	1,59	970.898.500	DLH
		2	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Presentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	1,40	1,58	942.569.900	DLH
		3	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan	Persen	60,00	66,00	119.132.400	DLH
		4	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Sarana Prasarana Persampahan	Persen	0	100	51.251.500	Dis PUTR
2	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	5	Program penanggulangan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	1.097.993.000	BPBD
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100		
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	87,30	100		

No	Prioritas / Sasaran Pembangunan Daerah		Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2022	Target	Kebutuhan Dana	OPD Penganggung Jawab
		6	Program pengelolaan persampahan	Presentase Pengelolaan Persampahan yang bernilai ekonomi	Persen	0,71	1,3	1.464.629.000	DLH
3	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	7	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (SPM)	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	92,68	100	232.338.000	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
				Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran	Menit	7,58	6,00		

Sumber : Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2023, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Tabel 3.5 diatas menunjukkan keselarasan terkait indikator kinerja 72 (tujuh puluh dua) program prioritas perangkat daerah dengan 17 (tujuh belas) sasaran prioritas pembangunan daerah. sedangkan keterkaitan antara sasaran prioritas Pembangunan nasional dengan program prioritas pembangunan daerah diuraikan pada tabel 3.5 di atas.

Pernyataan pada tabel 3.5 dan tabel 3.8 diatas dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 halaman 117.

Harmonisasi dan Sinkronisasi pencapaian tersebut di atas dicapai melalui fasilitasi pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pada masing-masing bidang perencanaan Pembangunan diantaranya :

- a) Bidang Pemerintahan yakni : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem, koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data P3KE serta pemantuan capaian pelaksanaan SDGs;
- b) Bidang Pembangunan manusia diantaranya fasilitasi pendampingan penurunan angka stunting (rembuk stunting, manajemen data stunting, reviu program kegiatan penurunan angka stunting), pengembangan regulasi anak putus sekolah (pengembangan rencana aksi daerah dan memastikan anggaran berbasis sektor), kesetaraan gender, Kabupaten Layak Anak (KLA), serta teviu terhadap capaian indikator kabupaten sehat;
- c) Bidang perekonomian diantaranya fasilitasi pendampingan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi Hijau propinsi Sulawesi Selatan;
- d) Bidang Sumber Daya Alam diantaranya fasilitasi pendampingan Pamsimas (penyediaan air minum berbasis masyarakat), Sanimas (sanitasi berbasis masyarakat), RPSDA-WS (rencana pembangunan strategis sumber daya air wilayah Jeneberang) dan Penyusunan KLHS RPJPD Selayar 2025-2045;
- e) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan diantaranya fasilitasi pendampingan Penyusunan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar dan RDTR (Kawasan KIPT Hangkoang dan KEK Pasi Gusung) dan pendampingan Pisew (Penyelenggaraan Infrastruktur Ekonomi Wilayah).

❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2026**

Melihat dari keterkaitan target dan capaian akhir tujuan dan sasaran strategis terkait capaian indikator tujuan ke-1, sasaran ke-1, maka dapat dilihat bahwasanya tahun kedua renstra telah mencapai target yang ingin diraih.

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensi**

Sesuai penjabaran sebelumnya, bahwa indikator Sasaran Strategis Pertama ini didukung oleh **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan** dan **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** yang terdapat di tiga Bidang yakni Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Tabel 3.9
Corscutting Sasaran Program Kegiatan

Sasaran	Program/Kegiatan
Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah (S3)	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)
	a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	c. Pengendakian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. Porgram Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Anggaran Sasaran ke-1

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realiasasi	Capaian
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Rp. 1.530.427.100	Rp.1.446.285.929	94.50%

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Sasaran ke-1

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	111,11	94,50	99.05	118,14	Sanagt Efisien

Dari kedua tabel diatas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.1.446.285.929 atau 94,50% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 111,11%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-1 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 99,05%.

❖ Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah :

a. Pendukung :

- Terjalannya koordinasi mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan;
- Konsistensi dalam implementasi program kegiatan;
- Sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelibangda.

b. Permasalahan :

- Dinamisnya perubahan peraturan yang berkaitan dengan dokumen perencanaan, hal ini berdampak pada tingkat konsistensi indikator kinerja dokumen perencanaan daerah dengan indikator kinerja dokumen perencanaan OPD pelaksana;
- Belum Optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengumpulan dan Validasi data capaian indikator kinerja daerah (SPM, LPPD, dan SDGs) dari OPD Pelaksana yang terbagi dalam Bidang Infrastruktur, Bidang SDA, Bidang Perekonomian, Bidang Pembangunan Manusia dan Bidang Pemerintahan Kewilayahan, hal ini berdampak pada lambatnya penyusunan Rancangan Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya pada Bab II yang memuat gambaran umum kondisi daerah.

c. Solusi

- Pengoptimalan penyediaan data/informasi yang berkualitas dan pengoptimalan hasil kajian penelitian dan pengembangan;
- Peningkatan fungsi kelembagaan, kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur,

ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

3.2.1.A Pengukuran Capaian Sasaran ke - 2

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke-2 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yang berfokus pada Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran	: Meningkatkan penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas
Indikator	: Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik.

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12
Target dan Realisasi kinerja sasaran ke-2

N o	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2023)	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
2.	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik	100	100	100	100	100	100

- **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator sasaran ke-2**
- ❖ Indikator Persentase Hasil Penelitian atau Rekomendasi Kebijakan/Naskah akademik yang Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan atau Naskah Akademik, Indikator ini mengukur sejauh mana hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, program, atau naskah akademik. Indikator ini menunjukkan tingkat integrasi hasil riset ke dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen strategis, tujuannya adalah 1) Memastikan pengambilan keputusan didasarkan pada penelitian yang valid dan rekomendasi yang relevan, 2) Meminimalkan risiko kebijakan yang tidak tepat sasaran. 3) Mendukung Peningkatan Kualitas Naskah Akademik yang kuat secara substansi dan berdasar pada riset yang komprehensif. Dampaknya Kebijakan yang Lebih Responsif/Relevan dan

Akurat akan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, sehingga meningkatkan akuntabiitas dan legitimasi pemerintahan, mendorong sinergi dengan perguruan tinggi dan riset untuk mencegah tumpang tindih riset yang tidak terpakai atau tidak relevan, Indikator Kinerja sasaran satu didukung 1 (satu) Program, yakni Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tabel 3.13
Croscutting Sasaran Program

Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Program	Indikator	target	Capaian
Meningkatnya penerapan teknologi dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik	100	100	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah	100	100

Penjelasan Capaian Indikator Program

- Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator kinerja kunci program yaitu Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan dan Penerapan Inovasi Daerah, indikator ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil penelitian dan pengembangan (kelitbangan) serta inovasi yang dihasilkan telah dimanfaatkan atau diterapkan dalam kebijakan, program, kegiatan pembangunan, atau layanan publik di daerah, memastikan bahwa hasil riset dan inovasi benar-benar diterapkan secara nyata, sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 dalam mendukung kesempurnaan dokumen perencanaan Pembangunan daerah, diantaranya :

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Tahun 2024, Bappelitbangda Kepulauan Selayar melaksanakan beberapa kegiatan kelitbangan, 5 (lima) diantaranya akan dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah pada penyusunan naskah akademik atau penyusunan Rancangan Awal (Teknokratik) dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, penyusunan Rancangan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024 dan penyusunan Rancangan Awal (Teknokratik) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Adapun judul dari 5 kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan Ranwal tersebut yaitu :

1. Pengukuran/Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (Amanat RPJMD);
2. Pengukuran/Survei Indeks Kesalehan Sosial (Amanat RPJMD),
3. Fasilitasi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah
4. Fasilitasi Pendampingan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
5. Fasilitasi Pendampingan Pengukuran Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD).

Adapun kegiatan dan fasilitasi penelitian, pengkajian dan pengembangan tahun 2024 diantaranya :

1. Fasilitasi Pengukuran indeks daya saing daerah Tahun 2024;
2. Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Penginputan Indeks Inovasi Daerah;
4. Penyusunan Dokumen Realisasi Indikator Kinerja Kunci;
5. Penyusunan Dokumen Inovasi untuk Penghargaan Pembangunan Daerah;
6. Penyusunan Policy Brief;
7. Fasilitasi Kerjasama Budidaya Teripang dan Perlindungan Lamun yg kerja sama dengan Universitas Nasional;
8. Survei Produk Unggulan Daerah.

❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2026**

Melihat dari keterkaitan target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator sasaran ke-2, maka dapat dilihat

- bahwasanya tahun ketiga renstra telah mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar 100%
- ❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensi**
 Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran Kedua ini didukung oleh **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** yang terdapat di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel 3.14

Croscutting Sasaran Program dan Kegiatan

Sasaran	Program/Kegiatan
Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	a. Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian dan Peraturan
	b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
	c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.15

Capaian Anggaran Sasaran ke-2

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penerapan kelitbangan (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas (S2)	Rp. 350.000.000	Rp.344.412.675	98,40%

Tabel 3.16

Tingkat Efisiensi Sasaran ke-2

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	98,40	99.02	100,99	Efisien

Dari kedua tabel diatas, realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.344.412.675 atau 98.40% dari target dengan rata-rata capaian kinerja

- sasaran sebesar 100%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-2 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 99.02%.
- ❖ Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah :
 - a. Pendukung :
 - Koordinasi yang baik antara Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Stakeholder terkait dalam meningkatkan inovasi daerah guna mendukung inovasi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. Permasalahan :
 - Penyediaan data base kelitbangan yang akurat dan up to date guna mendukung kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat guna kepentingan pengambilan kebijakan dalam menindaklanjuti isu-isu aktual dan strategis;
 - c. Solusi
 - Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama guna mendorong pengembangan database penelitian dan inovasi daerah yang berbiaya murah.

3.2.2 Pengukuran Capaian Tujuan ke -2

Tujuan ke-2 ini menjadi indikator impack yang berfokus pada upaya sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja, efisiensi, dan efektivitas aparatur negara dalam melayani masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indikator ini di topang oleh 3 (tiga) Indikator Sasaran.

Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Target dan Realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.17 Target dan Realisasi kinerja tujuan ke-2							
N o	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2023)	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026
			Tar get	Reali sasi	Capai an		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	na	BB	na	na	BB	na

Sumber Bappelitbangda Kep Selayar 2024

➤ **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator Tujuan ke-1**

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah instrumen yang digunakan untuk menilai sejauh mana reformasi birokrasi diimplementasikan di tingkat pemerintah daerah. Penilaian ini bertujuan untuk mendorong perbaikan dalam hal efisiensi administrasi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas.

Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja tujuan dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024, disebabkan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 belum dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu urusan/kewenangan.

3.2.2.A Pengukuran Capaian Sasaran ke - 3

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke-3 mempunyai 3 (tiga) inikator kinerja. Sasaran ke-3 ini menjadi sasaran yang berfokus pada Bidang Sekretariat, dengan indikatornya adalah sebagai berikut

Sasaran	:	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah
Indikator	:	1. Nilai Sakip 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.18
Target dan Realisasi kinerja sasaran ke-3

No	Indikator	Capaian Tahun Lalu (2022)	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	Capaian		
3.	Nilai Sakip	B** (60,84)	B (60)	BB* (70,10)	116,8	BB (70)	100
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (79,7)	B	B (82,11)	103	B	100
5.	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	n/a	Sesuai	n/a	n/a	Sesuai	n/a

*Capaian kinerja Tahun 2023

➤ **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-3**

- ❖ Tabel 3.18 Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja indikator sasaran ke-3 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **Nilai Sakip sebesar 116,8%.**

Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran dengan indikator kinerja **Nilai Sakip** belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024, disebabkan pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2024 belum dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu urusan/kewenangan. Adapun target yang ingin dicapai oleh Bappelitbangda Kepulauan Selayar tahun 2024 mendapat nilai B (60).

Namun demikian, dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian SAKIP Bappelitbangda Nomor : 022/EV-LAKIP/II/2024/ITDA tanggal 26 Februari 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, bahwasanya Bappelitbangda memperoleh nilai sebesar 70,10 dengan kategori BB (Sangat Baik), dengan demikian Bappelitbangda akan terus bekerja lebih giat agar dapat terus meningkatkan nilai Sakip yang diperoleh.

➤ **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-4**

- ❖ Tabel 3.18 diatas menunjukkan realisasi kinerja indikator sasaran ke-4 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat** dengan nilai B atau 103.

Berdasarkan data laporan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappeda Litbang) Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan adalah baik. Nilai rata-rata keseluruhan unsur layanan adalah 82,11 dalam skala 100. Namun, terdapat beberapa unsur layanan yang perlu diperbaiki, yaitu waktu pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan pengguna layanan.

Beberapa rekomendasi terhadap perbaikan diantaranya penerapan system pelayanan secara online, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana secara berkala, serta penerapan system pengaduan secara online.

Untuk itu Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar berkomitmen meningkatkan pelayanan dengan menerapkan system berbasis online.

➤ **Penjelasan target, realisasi dan capaian indikator ke-5**

- ❖ Tabel 3.18 diatas menunjukkan realisasi kinerja indikator sasaran ke-5 dengan indikator kinerja sasaran yaitu Sesuai.

Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran dengan indikator kinerja **Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan** belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024, dikarenakan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah tahun 2024 baru disusun pada awal tahun 2025 serta pelaksanaan penilaian atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan pada awal tahun 2025.

- ❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2026**

- a. Pada sasaran ke-3 Indikator ke-1 yaitu **Nilai Sakip**, maka dapat dilihat bahwasanya realisasi tahun kedua Renstra mendapat nilai Sakip 70.10 atau Predikat BB dengan Capaian 116,8%. jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 70 atau predikat BB, Bappelitbangda telah mencapai target tahun terakhir renstra, Bappelitbangda akan terus berupaya dan berkomitmen dalam meningkatkan Nilai SAKIP menjadi lebih baik lagi;
- b. Pada sasaran ke-3, Indikator 2 yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat**, maka dapat dilihat bahwasanya Realisasi tahun ketiga Renstra dengan nilai B atau 82.11 dengan capaian 103%, maka dapat dilihat bahwasanya tahun ketiga renstra telah mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar 100%, akan tetapi Bappelitbangda akan terus berupaya dan berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan dengan berbasis online.

- c. Pada sasaran ke-3, Indikator 3 yaitu **Laporan Keuangan sesuai standar Akuntansi Pemerintahan** merupakan indikator baru yang masuk pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta penilaian akan laporan keuangan 2024 baru akan dilakukan pada tahun 2025 oleh perangkat daerah pengampu kewenangan.
- ❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensi**
- Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran Kedua ini didukung oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Tabel 3.19 Croscutting Sasaran Program dan Kegiatan		
Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Nilai Sakip	a. Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah
	Indeks Kepuasan Masyarakat	b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		b. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
		c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.20 Capaian Anggaran Sasaran ke-3			
Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realiasasi	Capaian
1. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Rp.4.180.522.200	Rp.3.032.191.694	72.53%

Tabel 3.21
Tingkat Efisiensi Sasaran ke-3

Indikator Strategis	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Efieiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
1. Nilai Sakip	100*	84.25	91.16	118,69	Sangat Efisien
2. Indeks Kepuasan Masyarakat	100	97,01	99.03	103.08	Sangat Efisien
3. Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	n.a	73.6	n.a	n.a	n.a
Rata-rata Capaian Kinerja	100	90.63	95.09	110.88	Sangat Efisien

* capaian Kinerja tahun 2023

Dari kedua tabel diatas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.4.252.274.955 atau 96,91% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Dengan membandingkan antara capaian kinerja pada sasaran ke-3 dan realisasi anggaran, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 95.09%, seperti yang digambarkan pada tabel 3.21.

❖ Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah :

d. Pendukung :

- Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam lingkup kerja Bappelitbangda Kepulauan Selayar;
- Sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai;
- Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja.

e. Permasalahan :

- Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.

f. Solusi

- Peran aktif pejabat struktural dalam mengawal program dan kegiatan baik dari kinerja maupun anggaran;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran hal ini dilakukan agar pencapaian target kinerja dapat dicapai;
- Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan teknis.

3.3. REALISASI KEUANGAN

Anggaran menjadi faktor pendukung dan berpengaruh dalam rangka mencapai indikator keberhasilan. Program dan kegiatan juga dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang memadai, dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan target belanja setelah APBD perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.6.322.618.083 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.22
Target belanja Bappelitbangda APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	target	Persentase
1	Belanja Operasi	Rp.6.208.402.800	99.05%
1.1	Gaji Pokok PNS	Rp. 3.256.102.600	51,95%
1.2	Belanja Barang Jasa	Rp. 2.952.300.200	47,10%
2	Belanja Modal	Rp. 59.775.200	0,95%
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 55.113.900	0,88%
2.2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.661.300	0,07%

- A. Belanja Operasi
- Belanja Operasional Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp.6.208.402.800,- dan terealisasi sebesar Rp.5.985.173.559,- atau 96,40%.
- B. Belanja Modal
- Belanja Modal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp.59.775.200,- dan terealisasi sebesar Rp.57.800.000,- atau 96,7%

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi kinerja keuangan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.23

Formulir Evaluasi Hasil Renja, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Pelaksanaan 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)			
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah			Nilai Sakip (Indeks)	BB	22.286.459.390	B	0	BB	4.387.750.900														
				Laporan Keuangan OPD Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (Status)	Sesuai		Sesuai		Sesuai															
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (Indeks)	B		B		B															
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja (%)	72,31	22.286.459.390	0,00	0	71,51	4.387.750.900							0	3.036.091.494						
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	95,00		0,00		88,00							0								
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu (%)	100,00	171.500.001	0,00	0	100,00	15.000.000	32,14%	1.566.600	22,62%	2.478.000	55,95%	1.324.600	0,00%	0	0,00%	5.369.200	31,84%	5.369.200	31,84%	3,13%
		5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	27.500.000	0	0	3	2.000.000	0	977.000	1	0	2	0	0	3	977.000	3	977.000	42,86%	3,55%	
		5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	19.000.001	0	0	1	1.500.000	0	0	1	0	1	735.000	0	0	2	735.000	2	735.000	40,00%	3,87%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)	
											I		II		III		IV							
											9		10		11		12							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	5	19.000.000	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	20,00 %	0,00 %
		5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	5	25.000.000	0	0	1	1.500.000	1	589.600	0	0	0	0	0	0	1	589.600	1	589.600	20,00 %	2,36 %
		5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	5	25.000.000	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	20,00 %	0,00 %
		5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	41.000.000	0	0	3	4.000.000	3	0	0	2.478.000	0	589.600	0	0	3	3.067.600	3	3.067.600	20,00 %	7,48 %
		5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	15.000.000	0	0	4	3.000.000	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3	0	60,00 %	0,00 %
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100,00	15.758.173.684	0,00	0	100,00	3.276.102.600	31,25 %	816.378.468	18,75 %	688.407.190	50,00 %	893.809.989	0,00 %	0	0,00 %	2.398.595.647	27,34 %	2.398.595.647	27,34 %	15,22 %
		5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	155	15.563.673.684	0	0	30	3.256.102.600	30	813.442.968	0	688.407.190	0	880.415.889	0	0	30	2.382.266.047	30	2.382.266.047	19,35 %	15,31 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)				
								I		II		III		IV		13=9+10+11+12						14=7+13		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6x100										
				Gaji dan Tunjangan ASN																				
		5.01.01.2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120	100.000.00 0	0	0	24	12.000.00 0	6	2.935.50 0	6	0	0	7.004.00 0	0	0	12	9.939.500	12	9.939.500	10,00 %	9,94 %
		5.01.01.2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	72.500.000	0	0	2	5.000.000	0	0	1	0	2	4.074.50 0	0	0	3	4.074.500	3	4.074.500	60,00 %	5,62 %
		5.01.01.2.02. 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	22.000.000	0	0	1	3.000.000	0	0	0	0	1	2.315.60 0	0	0	1	2.315.600	1	2.315.600	20,00 %	10,53 %
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Penataan barang milik daerah yang tertib, teratur dan efektif (%)	100, 00	45.000.000	0,00	0	100, 00	7.559.900	12,50 %	0	37,50 %	0	12,50 %	4.599.20 0	0,00 %	0	0,00 %	4.599.200	12,50 %	4.599.200	12,50 %	10,22 %
		5.01.01.2.03. 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	25.000.000	0	0	4	3.469.400	1	0	1	0	1	2.185.60 0	0	0	3	2.185.600	3	2.185.600	15,00 %	8,74 %
		5.01.01.2.03. 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	20.000.000	0	0	2	4.090.500	0	0	1	0	0	2.413.60 0	0	0	1	2.413.600	1	2.413.600	10,00 %	12,07 %
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kepuasaan Layanan administrasi kepegawaian SKPD (%)	100, 00	387.000.00 0	0,00	0	100, 00	10.000.00 0	50,00 %	0	50,00 %	900	0,00 %	2.875.00 0	0,00 %	0	0,00 %	3.775.000	5,71 %	3.775.000	5,71% 	0,98 %
		5.01.01.2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan	35	387.000.00 0	0	0	2	10.000.00 0	1	0	1	900.000	0	2.875.00 0	0	0	2	3.775.000	2	3.775.000	5,71% 	0,98 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)				
								I		II		III		IV		13=9+10+11+12						14=7+13		
								1	2	3	4	5	6		7		8			9		10		11
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																				
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan Administrasi Umum Kantor (%)	100,00	2.786.901.705	0,00	0	100,00	559.749.500	26,25 %	74.919.700	27,92 %	57.893.940	6,25 %	236.498.039	0,00 %	0	50,00 %	369.311.679	39,58 %	369.311.679	39,58 %	13,25 %
		5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	175.000.000	0	0	12	20.437.500	3	900.000	3	0	3	6.738.500	0	0	9	7.638.500	9	7.638.500	15,00 %	4,36 %
		5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	175.000.000	0	0	12	12.120.000	3	1.905.000	3	1.470.000	0	3.040.000	0	0	6	6.415.000	6	6.415.000	120,00 %	3,67 %
		5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	2.332.101.705	0	0	60	472.592.000	33	72.114.700	37	56.423.940	0	206.959.539	0	0	70	335.498.179	70	335.498.179	23,33 %	14,39 %
		5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	104.800.000	0	0	1	54.600.000	0	0	0	0	0	19.760.000	0	0	0	19.760.000	0	19.760.000	0,00 %	18,85 %
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan BMD (%)	100,00	355.000.000	0,00	0	100,00	59.775.200	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %
		5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	250.000.000	0	0	5	55.113.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
		5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40	105.000.000	0	0	1	4.661.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)	
											I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	2.060.684.000	0,00	0	100,00	270.493.700	0,00%	13.812.561	0,00%	89.188.724	0,00%	48.469.998	0,00%	0	0,00%	151.471.283	0,00%	151.471.283	0,00%	7,35%
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5	215.000.000	0	0	1	27.872.000	0	7.212.561	0	4.415.524	0	8.730.398	0	0	0	20.358.483	0	20.358.483	0,00%	9,47%
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	1.845.684.000	0	0	1	242.621.700	0	6.600.000	0	84.773.200	0	39.739.600	0	0	0	131.112.800	0	131.112.800	0,00%	7,10%
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100,00	722.200.000	0,00	0	100,00	189.070.000	0,00%	44.609.500	0,00%	4.782.500	66,67%	53.577.485	0,00%	0	0,00%	102.969.485	16,94%	102.969.485	16,94%	14,26%
		5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85	503.000.000	0	0	17	140.500.000	0	34.944.500	0	4.782.500	17	49.608.125	0	0	17	89.335.125	17	89.335.125	20,00%	17,76%
		5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	12.500.000	0	0	2	2.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	35.000.000	0	0	7	6.410.000	0	2.437.000	0	0	7	0	0	7	2.437.000	7	2.437.000	11,67%	6,96%	
		5.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	15.200.000	0	0	1	8.000.000	0	4.000.000	0	0	1	3.969.360	0	0	1	7.969.360	1	7.969.360	50,00%	52,43%
		5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	110.000.000	0	0	1	21.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)		
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70	46.500.000	0	0	14	9.760.000	0	3.228.000	0	0	14	0	0	0	14	3.228.000	14	3.228.000	20,00%	6,94%	
		5.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi (%)	100,00	0	0,00	0	100,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
		5.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (%)	100,00	0	0,00	0	100,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%
2	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah			Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	95	25.571.767.409	85	0	90	2.500.325.800															
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	90,00	9.661.493.458	80,00	0	90,00	969.898.700								80	386.975.229						
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan (%)	100,00	6.066.493.458	0,00	0	90,00	694.444.500	58,33%	119.949.400	0,00%	123.392.952	36,11%	108.169.377	0,00%	0	0,00%	351.511.729	20,48%	351.511.729	22,76%	5,79%	
		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai	8	540.000.000	0	0	2	41.316.000	1	19.403.800	0	0	1	19.519.400	0	0	2	38.923.200	2	38.923.200	25,00%	7,21%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)			
									I		II		III		IV									
									9		10		11		12									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pembangunan Daerah	Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)																				
		5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	8	1.670.000.000	0	0	2	90.849.800	1	17.177.400	0	27.073.800	1	34.076.177	0	0	2	78.327.377	2	78.327.377	25,00 %	4,69 %
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8	420.000.000	0	0	2	13.996.700	1	11.160.000	0	1.968.600	1	0	0	0	2	13.128.600	2	13.128.600	25,00 %	3,13 %
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8	765.000.000	0	0	1	65.455.000	1	0	0	61.555.400	0	0	0	1	61.555.400	1	61.555.400	12,50 %	8,05 %	
		5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2.200	590.000.000	0	0	440	48.480.000	440	47.751.400	0	0	0	0	0	440	47.751.400	440	47.751.400	20,00 %	8,09 %	
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/R KPD)	13	2.081.493.458	0	0	3	434.347.000	0	24.456.800	0	32.795.152	2	54.573.800	0	0	2	111.825.752	2	111.825.752	15,38 %	5,37 %
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan (%)	100,00	1.895.000.000	0,00	0	100,00	44.014.000	100,00 %	5.175.000	0,00 %	9.269.000	0,00 %	10.790.500	0,00 %	0	0,00 %	25.234.500	20,00 %	25.234.500	20,00 %	1,33 %
		5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan	5	585.000.000	0	0	1	15.560.500	1	0	0	6.897.000	0	7.321.700	0	0	1	14.218.700	1	14.218.700	20,00 %	2,43 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)		
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
				Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)																					
		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	140	680.000.000	0	0	28	10.822.500	28	5.175.000	0	2.372.000	0	0	2.265.800	0	0	28	9.812.800	28	9.812.800	20,00 %	1,44 %
		5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5	630.000.000	0	0	1	17.631.000	1	0	0	0	0	1.203.000	0	0	1	1.203.000	1	1.203.000	20,00 %	0,19 %	
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang dimanfaatkan (%)	100,00	1.700.000.000	0,00	0	100,00	231.440.200	12,50 %	0	37,50 %	5.175.000	12,50 %	5.054.000	0,00 %	0	0,00 %	10.229.000	12,50 %	10.229.000	12,50 %	0,60 %	
		5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10	775.000.000	0	0	2	19.897.200	0	0	1	0	0	5.054.000	0	0	1	5.054.000	1	5.054.000	10,00 %	0,65 %	
		5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	20	925.000.000	0	0	4	211.543.000	1	0	1	5.175.000	1	0	0	0	3	5.175.000	3	5.175.000	15,00 %	0,56 %	
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah (%)	95,00	15.910.273.951	0,00	0	90,00	1.530.427.100								0	320.230.500						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)	
											I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100, 00	2.671.572.8 61	0,00	0	90,0 0	343.692.0 00	50,00 %	64.006.6 00	0,00 %	20.446.7 00	0,00 %	143.402. 800	0,00 %	0	0,00 %	227.856.1 00	10,00 %	227.856.1 00	11,11 %	8,53 %
		5.01.03.2.01. 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55	390.000.00 0	0	0	11	15.285.60 0	11	7.800.00 0	0	0	0	0	0	0	11	7.800.000	11	7.800.000	20,00 %	2,00 %
		5.01.03.2.01. 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	55	140.000.00 0	0	0	11	10.244.70 0	11	1.548.00 0	0	1.548.00 0	0	0	0	0	11	3.096.000	11	3.096.000	20,00 %	2,21 %
		5.01.03.2.01. 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5	382.172.86 1	0	0	1	15.686.40 0	0	0	0	0	0	9.228.30 0	0	0	0	9.228.300	0	9.228.300	0,00%	2,41 %
		5.01.03.2.01. 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD	5	350.000.00 0	0	0	1	37.212.80 0	0	13.363.4 00	0	0	0	11.550.0 00	0	0	0	24.913.40 0	0	24.913.40 0	0,00%	7,12 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)				
								I		II		III		IV		13=9+10+11+12					14=7+13		15=14/6x100	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			Daerah Bidang Pemerintahan	pada Bidang Pemerintahan																				
		5.01.03.2.01. 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25	560.000.00 0	0	0	5	33.412.20 0	5	6.600.00 0	0	7.023.50 0	0	7.131.50 0	0	0	5	20.755.00 0	5	20.755.00 0	20,00 %	3,71 %
		5.01.03.2.01. 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25	60.000.000	0	0	5	8.501.400	5	0	0	0	0	3.300.20 0	0	0	5	3.300.200	5	3.300.200	20,00 %	5,50 %
		5.01.03.2.01. 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5	425.000.00 0	0	0	1	134.754.5 00	0	0	0	8.715.20 0	0	105.249. 800	0	0	0	113.965.0 00	0	113.965.0 00	0,00%	26,82 %
		5.01.03.2.01. 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5	364.400.00 0	0	0	1	88.594.40 0	0	34.695.2 00	0	3.160.00 0	0	6.943.00 0	0	0	0	44.798.20 0	0	44.798.20 0	0,00%	12,29 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)				
								I		II		III		IV										
								9		10		11		12										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (%)	100, 00	1.333.330.6 79	0,00	0	90,0 0	65.435.40 0	66,67 %	0	0,00 %	40.764.7 00	0,00 %	6.416.90 0	0,00 %	0	0,00 %	47.181.60 0	14,07 %	47.181.60 0	15,64 %	3,54 %
		5.01.03.2.02. 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18	293.845.07 6	0	0	4	14.134.10 0	4	0	0	12.395.4 00	0	0	0	0	4	12.395.40 0	4	12.395.40 0	22,22 %	4,22 %
		5.01.03.2.02. 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18	90.485.603	0	0	4	6.279.700	4	0	0	4.807.30 0	0	1.380.00 0	0	0	4	6.187.300	4	6.187.300	22,22 %	6,84 %
		5.01.03.2.02. 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5	325.000.00 0	0	0	1	3.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00 %	
		5.01.03.2.02. 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah Bidang SDA yang	15	220.000.00 0	0	0	3	28.614.30 0	3	0	0	23.562.0 00	0	2.070.00 0	0	0	3	25.632.00 0	3	25.632.00 0	20,00 %	11,65 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)				
									I		II		III		IV									
									9		10		11		12									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)																				
		5.01.03.2.02. 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15	68.000.000	0	0	3	5.348.300	3	0	0	0	0	2.966.900	0	0	3	2.966.900	3	2.966.900	20,00 %	4,36 %
		5.01.03.2.02. 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5	336.000.000	0	0	1	7.709.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00 %
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100,00	2.243.876.953	0,00	0	90,00	151.401.000	0,00%	8.544.800	0,00 %	31.585.600	50,00 %	5.062.400	0,00 %	0	0,00 %	45.192.800	10,00 %	45.192.800	11,11 %	2,01 %
		5.01.03.2.03. 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	20	332.628.925	0	0	4	50.027.300	0	0	0	14.101.600	4	0	0	0	4	14.101.600	4	14.101.600	20,00 %	4,24 %
		5.01.03.2.03. 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen	20	50.000.000	0	0	4	3.886.400	0	0	0	0	4	2.259.600	0	0	4	2.259.600	4	2.259.600	20,00 %	4,52 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)					
									I		II		III		IV									
									9		10		11		12									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																				
		5.01.03.2.03. 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	350.000.00 0	0	0	1	58.596.90 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		5.01.03.2.03. 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5	425.000.00 0	0	0	1	10.784.90 0	0	8.544.80 0	0	0	0	0	0	0	8.544.800	0	8.544.800	0,00%	2,01%	
		5.01.03.2.03. 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55	224.586.92 8	0	0	11	19.373.40 0	0	0	0	17.484.0 00	11	0	0	0	11	17.484.00 0	11	17.484.00 0	20,00%	7,78%
		5.01.03.2.03. 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	55	51.661.100	0	0	11	3.457.100	0	0	0	0	11	2.802.80 0	0	0	11	2.802.800	11	2.802.800	20,00%	5,43%
		5.01.03.2.03. 0007	Pelaksanaan Monitoring dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	5	400.000.00 0	0	0	1	3.529.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)	
											I		II		III		IV							
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																				
		5.01.03.2.03. 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5	410.000.00 0	0	0	1	1.745.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00 %
3	Meningkat kan penerapan kelitbanga n (teknologi dan inovasi) untuk mendukung perencana an pembangu nan yang berkualita s			Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang di manfaatkan dalam pengambilan kebijakan / naskah akademik (%)	100	3.980.000.0 00	100	0	100	350.000.0 00														
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentasi pemanfaatan hasil kelitbangan dan penerapan inovasi daerah (%)	100, 00	3.980.000.0 00	0,00	0	100, 00	350.000.0 00							0	137.851.2 75						
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	100, 00	2.200.000.0 00	0,00	0	100, 00	241.010.0 00	0,00%	19.661.6 00	0,00 %	24.118.4 00	0,00 %	19.893.8 75	0,00 %	0	0,00 %	63.673.87 5	0,00 %	63.673.87 5	0,00%	2,89 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021- 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)				
									I		II		III		IV									
									9		10		11		12									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pengkajian Peraturan	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang di manfaatkan (%)																				
		5.05.02.2.01. 0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	5	1.050.000.0 00	0	0	1	73.010.00 0	0	17.259.6 00	0	24.118.4 00	0	8.543.07 5	0	0	0	49.921.07 5	0	49.921.07 5	0,00%	4,75 %
		5.05.02.2.01. 0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5	1.150.000.0 00	0	0	1	168.000.0 00	0	2.402.00 0	0	0	0	11.350.8 00	0	0	0	13.752.80 0	0	13.752.80 0	0,00%	1,20 %
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan (%)	100, 00	1.250.000.0 00	0,00	0	100, 00	57.993.00 0	0,00%	0	0,00 %	32.189.2 00	0,00 %	11.712.4 00	0,00 %	0	0,00 %	43.901.60 0	0,00 %	43.901.60 0	0,00%	3,51 %
		5.05.02.2.02. 0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	5	1.250.000.0 00	0	0	1	57.993.00 0	0	0	0	32.189.2 00	0	11.712.4 00	0	0	0	43.901.60 0	0	43.901.60 0	0,00%	3,51 %
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian	100, 00	0	0,00	0	100, 00	0	0,00%	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00%	0,00 %

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)	
											I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Bidang Ekonomi dan Pembangunan	dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan (%)																				
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi dan Teknologi (%)	50,00	530.000.000	0,00	0	50,00	50.997.000	0,00%	0	0,00%	18.452.400	0,00%	11.823.400	0,00%	0	0,00%	30.275.800	0,00%	30.275.800	0,00%	5,71%
		5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	10	530.000.000	0	0	2	50.997.000	0	0	0	18.452.400	0	11.823.400	0	0	0	30.275.800	0	30.275.800	0,00%	5,71%
Total Target (Rp)							6.268.178.000		Total Realisasi (Rp)								3.881.148.498							
Rata-rata capaian kinerja (%)																			65,13	61,92				
Predikat kinerja																			S	R				

BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik, pemangku kepentingan, dan pemerintah sendiri mengenai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan unsur rencana program kerja, pencapaian tujuan kinerja, keuangan, pengelolaan sumber daya, transparansi, serta rekomendasi dan tindak lanjut atas pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 dengan Bupati Kepulauan Selayar.

Adapun keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat terus di tingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Bappelitbangda tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis 2 (dua) indikator tujuan yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 2 (dua) tujuan strategis Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, hanya 1 (satu) indikator sasaran yang belum dapat diukur dengan realisasi kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 adalah sebesar 100%;
2. Dari analisis 5 (lima) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 3 (tiga) sasaran strategis Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, hanya 1 (satu) indikator sasaran yang belum dapat diukur dengan realisasi kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 adalah sebesar 100%;
3. Realisasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 sebesar Rp. 5.985.173.559 atau sebesar 96.40%;
4. Berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja utama dan data keuangan Bappelitbangda tahun 2024, maka terjadi efisiensi anggaran sebesar 99,04% dengan tingkat efisiensi 100,97 atau sangat efisien;
5. Secara umum pencapaian target tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh konsistensi dalam implementasi program, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait serta ketersediaan data pembangunan yang komprehensif dan kontribusi kegiatan penelitian terhadap pengambilan kebijakan perencanaan;

6. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai salah satu kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Bappelitbangda Kepulauan Selayar;
- Mengoptimalkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan kelitbangan dari stakeholder terkait;
- Melakukan desiminasi tentang data pembangunan daerah dan kelitbangan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Meningkatkan penerapan hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk perumusan kebijakan maupun tata kelola pemerintahan serta inovasi pelayanan publik pada sistem perencanaan dan pengendalian yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian kinerja Pembangunan daerah.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2024, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam penyempurnaan dokumen perencanaan tahun selanjutnya, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih maju dan lebih baik.